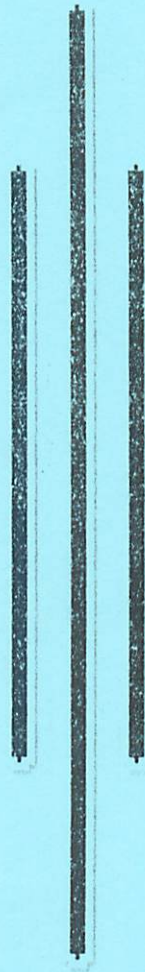




**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP)**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
KELURAHAN SUNGAINANGKA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2016 yang diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government yang melibatkan Stakeholders yang mana ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

AKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2016, termasuk pengukuran terhadap Pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan AKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kelurahan Sungainangka sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Januari 2017

LURAH SUNGAINANGKA



MOHAMAD ILHAM

Penata Tk.I

NIP. 196304051986011008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi serta pelayanan masyarakat dan pendekatan partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada peningkatan peran serta kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 mewajibkan kepada seluruh SKPD untuk menyusun AKIP setelah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran yang bersangkutan. AKIP ini merupakan salah satu instrument untuk menjawab persoalan dalam menghadapi perubahan paradigma tersebut.

Menyadari kian besarnya tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran, maka Kelurahan Sungainangka dalam menyusun AKIP Tahun Anggaran 2016 yang juga sebagai akumulasi pembulatan atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2016 tetap mengacu kebijakan yang telah digariskan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ada 7 (Tujuh) Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kelurahan Sungainangka yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
4. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
5. Meningkatnya Kualitas Kebersihan & Kesehatan Lingkungan Pemukiman
6. Meningkatnya perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
7. Meningkatnya Kesehatan Bayi / Balita dan Ibu

Dengan disusunnya Lakip ini, diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kelurahan Sungainangka guna mendukung terwujudnya Good Corporate Governance dan Clean Government yang akhirnya bermuara terwujudnya pelaksanaan Pelayanan Prima bagi Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tugas Pokok dan Fungsi	1
C Aspek Strategis	5
D Struktur Organisasi	6
E Sistematika Penulisan	6
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
C. Strategi dan Kebijakan	10
D. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016	14
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	22
BAB. IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN	25
B. PENUTUP	25
Lampiran – Lampiran :	26
1. SK. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TAHUN 2016	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2016	
4. Lain – lain yang dianggap perlu	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini pemerintah dituntut agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih kearah transparansi dan partisipatif dan dengan berakhirnya program dan kegiatan Tahun 2016, maka diperlukan penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan peraturan menteri pendayaan aparatur negara Nomor 29 Tahun 2010 dan sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akutantabilitas Kinerja Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun pelaporan tersebut secara akuntabel dengan menyesuaikan serta menyelaraskan sasaran strategis pada RENSTRA Kelurahan Sungainangka Tahun 2013 - 2016 dan Indikator Kinerja Utama Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran di RENSTRA Kelurahan Sungainangka Tahun 2013 - 2016.

Dengan adanya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kelurahan Sungainangka dapat terukur hasil kinerja serta program kegiatan yang telah dicapai secara akuntabel selama satu tahun dan rencana kerja tahunan yang menjadi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Pemerintah Kelurahan Sungainangka Pada Tahun 2016.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kelurahan Sungainangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 7 Kelurahan di Wilayah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian tugas dan fungsi Kelurahan Kota Balikpapan, maka tugas pokok Kelurahan Sungainangka adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Adapun fungsi Kelurahan Sungainangka adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan ;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan ;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan ;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan ;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan ;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat dan ;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam organisasi Kelurahan Sungainangka terdapat susunan organisasi Kelurahan yang terdiri dari :

1. Lurah ;
2. Sekretariat ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Ketentraman , Ketertiban, dan Lingkungan Hidup ;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat ;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan ;
- d. Menyelenggarakan dan membina ketentraman dan ketertiban wilayah ;

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Kelurahan ;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatusahaan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor ;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur Kelurahan ;
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor ;
- g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan ;
- h. Melaksanakan pengadaan , pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang ;
- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan ;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai ;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan ;

1. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan ;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan ;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah Kelurahan ;
- d. Melaksanakan pemberian rekomendasi / surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga – lembaga kemasyarakatan kelurahan ;
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan ;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan ;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di wilayah Kelurahan ;
- i. Menyusun profil dan monografi Kelurahan ;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi ;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada lurah, Kepala Seksi Tramtib dan LH mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban lingkungan hidup ;
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah Kelurahan ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan ;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks G.30.S.PKI ;
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan , membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kelurahan ;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan ;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup ;
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang tramtib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kelurahan ;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah ;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM dan RT ;

- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah, Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kelurahan bersama dengan LPM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah Kelurahan ;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah Kelurahan ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan ;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan ;
- h. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi ;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

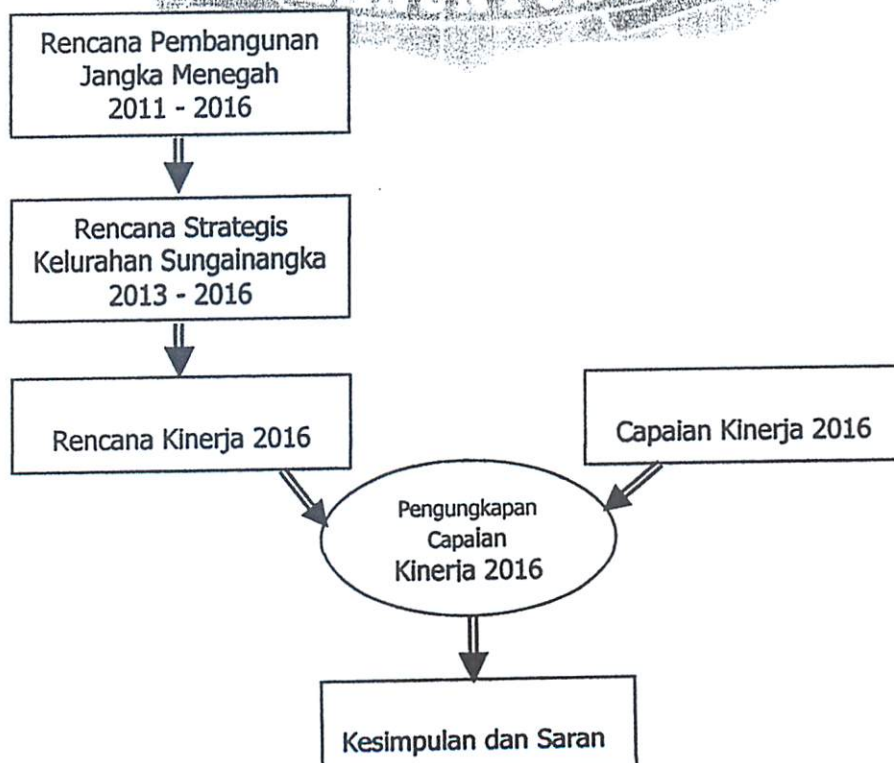
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial ;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah Kelurahan ;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah Kelurahan ;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan ;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan ;

- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi social kemasyarakatan di wilayah Kelurahan ;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana di wilayah Kelurahan ;
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha – usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam ;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat ;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

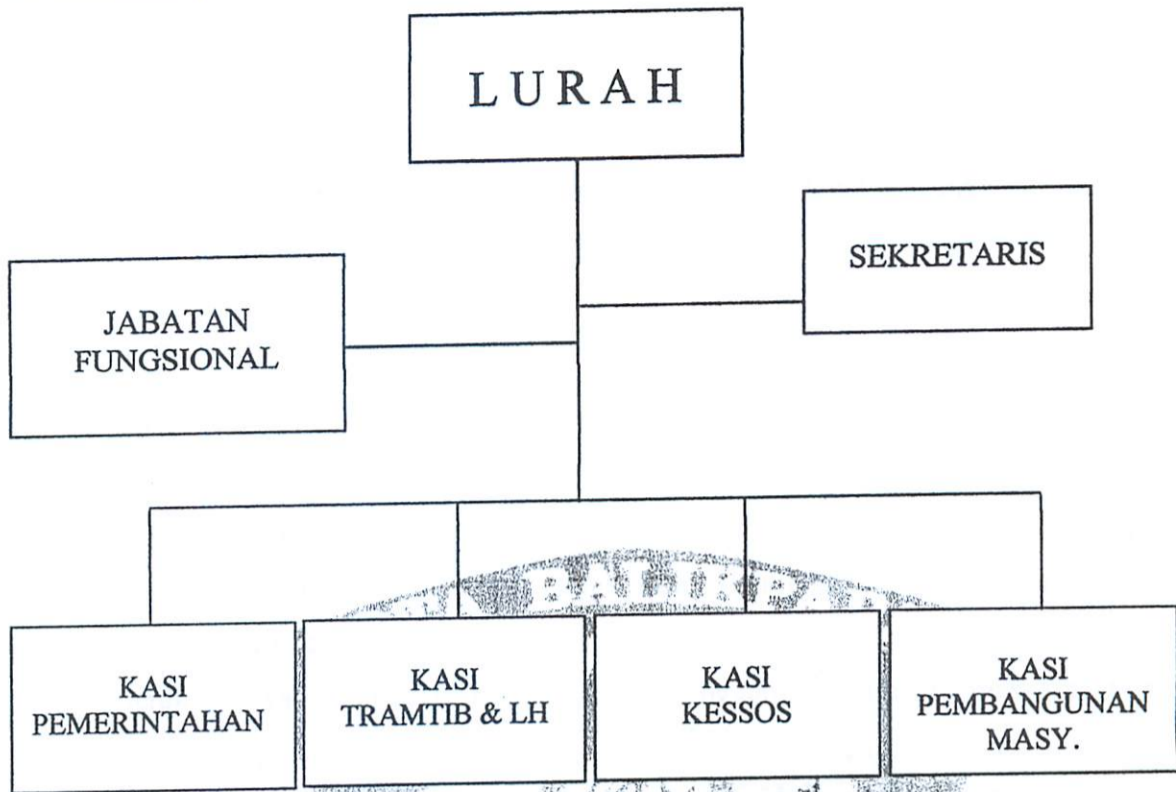
C. ASPEK STRATEGIS

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Sungainangka bertujuan untuk mengkomunikasikan Evaluasi Pemerintahan serta Capaian Kinerja Kelurahan Sungainangka selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016. Guna mengetahui keberhasilan Kelurahan Sungainangka terhadap Capaian Kinerja (Performance Result) selama satu tahun, maka harus dilakukan perbandingan atau rasio dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun yang sama sebagai tolok ukur dari tingkat keberhasilan tahunan Kelurahan Sungainangka. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan Kinerja Kelurahan Sungainangka dimasa datang.

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, maka dipandang perlu memberikan ilustrasi mengenai aspek strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Sungainangka dalam bentuk bagan sebagai berikut :



D. STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SUNGAINANGKA



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungainangka adalah, sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang dan landasan hukum disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Sungainangka selanjutnya diuraikan pula tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi dan Misi Kelurahan Sungainangka, tujuan strategis, sasaran program dan kegiatan, strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran, rencana kinerja dan penetapan kinerja.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan tentang pengungkapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab 4 Penutup

Dalam bab ini yaitu kesimpulan dan saran dan lampiran terdiri dari SK.Indikator Kinerja Utama rencana kerja tahunan dan pengukuran kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan, maka Kelurahan Sungainangka perlu secara berkesinambungan mengembangkan kemampuan, kreatifitas, peluang dan inovasi, sehingga dapat tetap mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan.

Meningkatnya kompetisi dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, partisipasi dan akomodatif terhadap berbagai bentuk-bentuk pelayanan publik, mendorong Kelurahan Sungainangka mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul. Untuk mewujudkan cita-cita itu Kelurahan Sungainangka senantiasa mengupayakan berbagai perubahan yang menuju kearah perbaikan kinerja, meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan menetapkan standar-standar kerja guna menunjang penyelesaian tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana konsisten dan berkelanjutan, dengan harapan agar dapat terwujudnya suatu peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat sebagai implementasi dari pada pelayanan publik.

Oleh sebab itu guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka Kelurahan Sungainangka telah menetapkan Visi sebagai instrumen untuk menentukan kearah mana pencapaian hasil itu akan dituju. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dan sangat menentukan kemana Kelurahan Sungainangka akan di arahkan dan apa yang akan dicapai. Untuk itu Kelurahan Sungainangka telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu:

**“TERWUJUDNYA KELURAHAN SUNGAINANGKA
YANG PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL
DIDUKUNG PELAYANAN PRIMA
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Visi Kelurahan Sungainangka harus selaras dan merupakan bagian dari pada Visi Kota Balikpapan, dan oleh sebab itu untuk mencapai keberhasilan Visi Kota Balikpapan yaitu Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman. Adanya konsep perencanaan yang mengarah pada pencapaian visi Kota seperti ini harus secara konsisten dilakukan pula oleh Kelurahan Sungainangka maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Penjelasan mengenai visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **PROFESIONAL**

Kemampuan beradaptasi, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan fenomena global dan fenomena nasional. Mengacu kepada misi dan nilai (*mission & values-driven professionalism*), birokrasi memposisikan diri sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai organisasi.

- **PARTISIPATIF**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- **AKUNTABEL**

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

- **PELAYANAN PRIMA**

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah "*excellent service*" yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

- **MASYARAKAT SEJAHTERA**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, pembangunan Kelurahan bukan hanya untuk kemajuan dan kemandirian, tetapi juga kesejahteraan khususnya pada masyarakat, maka dari hasil keseluruhan konsep penjelasan visi Kelurahan Sungainangka adalah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sungainangka dan diharapkan dapat meningkatkan di berbagai sektor.

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Kelurahan Sungainangka yang Profesional, Partisipatif dan Akuntabel Didukung Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera”, maka misi dari Kelurahan Sungainangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ;
2. Meningkatkan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dan kemitraan kelurahan ;
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak ;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat demi kemajuan pembangunan wilayah kelurahan ;
5. Terciptanya Keamanan, ketertiban dan sadar lingkungan ;
6. Terciptanya masyarakat agamis.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi, Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealis, berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil;
2. Jangkauan kedepan, yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelurahan Sungainangka ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Abstrak, berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berdasarkan Misi dan faktor-faktor Kunci keberhasilan Kelurahan Sungainangka menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran Kelurahan Sungainangka Kecamatan Balikpapan Selatan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat

Tujuan : **Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dan Kemitraan Kelurahan

Tujuan : **Peningkatan Pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan**

Sasaran : Meningkatkan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat

3. Meningkatkan Peran Aktif dan Kegotongroyongan Masyarakat Demi Kemajuan Pembangunan Wilayah Kelurahan

Tujuan : Peningkatan perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan serta partisipasi masyarakat terhadap swadaya pembangunan
Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

4. Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Sadar Lingkungan

Tujuan : Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas

Sasaran : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

5. Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman

Tujuan : Penataan lingkungan untuk mewujudkan program Clean Green & Healthy (CGH) dan Persiapan Pelaksanaan Penilaian ADIPURA.

Sasaran : Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman

6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Tujuan : Pendataan penduduk dalam peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

7. Meningkatkan Kesehatan Bayi/ Balita dan Ibu

Tujuan : Peningkatan kesehatan bayi / balita dan ibu untuk mengurangi angka kematian bayi/balita dan ibu.

Sasaran : Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis Kelurahan Sungainangka merupakan penjabaran Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dialokasikan dalam 3 (tiga) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sasaran strategis Kelurahan Sungainangka merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis, dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan Tujuan Strategis juga dapat dicapai.

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Indikator Pencapaian Sasaran. Indikator Pencapaian Sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan. Kinerja pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Adapun Indikator Kinerja masing-masing sasaran tersebut diatas adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (ada 14 unsur yang dinilai) 2. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan 3. Jumlah Surat Pengantar Bidang Pelayanan
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik 2. Persentase kehadiran RT pada Rapat Koordinasi RT 3. Persentase RT yang mengelola administrasi yang baik 4. Jumlah peserta STQ
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan 3. Jumlah realisasi fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan
4.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Poskamling yang aktif 2. Persentase angka kriminalitas 3. Angka validasi monitoring Kamtibmas
5.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Persentase pengolahan sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos 4. Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bakti Massal (KBM)
6.	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka validasi data penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Penyandang cacat b. Lansia c. Putus sekolah d. Buta huruf 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah keluarga miskin
7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian ibu

<p>2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan - Pengembangan data/informasi - Pengelolaan Keragaman Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun tetangga 2. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT 3. Pembinaan , penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan 4. Penyusunan profile kelurahan 5. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi tilawatil qur'an (STQ)
<p>3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan 2. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan 3. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan 4. Penyusunan Renstra Kelurahan 5. Pelaksanaan komunikasi / informasi / edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah 6. Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum
<p>4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan 2. Melakukan koordinasi intensif dengan babinsa dan babinkamtibmas
		<ol style="list-style-type: none"> 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengawasan Kegiatan bantuan stimulan pembangunan lingkungan kelurahan

		- Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3. 4.	Melaksanakan posko hari - hari besar keagamaan dan tahun baru Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
5.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	- Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	1. 2. 3. 4.	Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM) Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan / tindakan pengupasan lahan tanpa izin Pengelolaan / pengangkutan sampah dan kebersihan Drainase Melaksanakan koordinasi dengan pihak RT dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan CGH
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	- Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	1.	Penmutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita	1. 2.	Melaksanakan koordinasi bersama pihak Dinas Kesehatan Kota Balikpapan , Puskesmas, Penyuluh KB dan Kader Posyandu di tiap RT Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Untuk mengukur Keberhasilan dari Implementasi Rencana Strategis Tahun 2016, Kelurahan Sungainangka menetapkan rencana dari masing-masing Sasaran yang harus dicapai sesuai Rencana Kinerja (Performance Plan) 2016 yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Namun dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan yang mengalami defisit anggaran sehingga Kelurahan Sungainangka juga harus merasionalisasi beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pada dasarnya Rencana Kinerja adalah Rencana Prestasi Kerja yang harus dicapai Tahun Anggaran berjalan dan tentunya untuk mengukur tingkat keberhasilan, perlu menetapkan target atas masing-masing Indikator Kinerja baik Indikator Kinerja Tingkat Sasaran maupun Indikator Kinerja Tingkat Kegiatan. Penetapan Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (ada 4 unsur yang dinilai) 2. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan 450 3. Jumlah Surat Pengantar Bidang Pelayanan 2500	> 80 (Nilai IKM)
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik 2. Persentase kehadiran RT pada Rapat Koordinasi RT 3. Persentase RT yang mengelola administrasi yang baik 4. Jumlah peserta STQ	30 RT 90 % 85 % 35 Orang
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah 2. Jumlah Usulan RT yang diterima dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan 3. Jumlah realisasi fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan	> 500 juta 15 Usulan 15 Kegiatan
4.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1. Jumlah Poskamling yang aktif 2. Persentase angka kriminalitas 3. Angka validasi monitoring Kamtibmas	20 Poskamling 0,0 % 12 Kegiatan
5.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Persentase pengolahan sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos 4. Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bakti Massal (KBM)	25 RT 2400 KK 25 % 12 Kali

6.	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka validasi data penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Penyandang cacat b. Lansia c. Putus sekolah d. Buta huruf 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah keluarga miskin 	<p>14 Orang 491 Orang 80 Orang 30 Orang 300 UKM 300 KK</p>
7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian ibu 	<p>0 % 0,02 % 1900 orang 30 Posyandu 0 %</p>



INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALASAN / SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (ada 14 unsur yang dinilai) 2. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan 3. Jumlah Surat Pengantar Bidang Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan RT & Masyarakat 2. Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Keputusan pelimpahan kewenangan
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik 2. Persentase kehadiran RT pada Rapat Koordinasi RT 3. Persentase RT yang mengelola administrasi yang baik 4. Jumlah peserta STO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pendataan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah angka partisipasi
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan 3. Jumlah realisasi fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan RT & Masyarakat 2. Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Rekapitulasi data
4.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Poskamling yang aktif 2. Persentase angka kemahalan 3. Angka validasi monitoring Kamtibmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kegiatan 2. Hasil monitoring dan pemantauan 3. Rekapitulasi data
5.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Persentase pengolahan sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos 4. Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bakti Massal (KBM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kegiatan 2. Hasil monitoring dan pemantauan 3. Rekapitulasi data
6.	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka validasi data penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Penyandang cacat b. Lansia c. Putus sekolah d. Buta huruf 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah keluarga miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring dan pendataan 2. Rekapitulasi Data

7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian ibu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kegiatan 2. Hasil monitoring dan Pendataan
---	--	--	--



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Target yang akan dicapai dalam sasaran strategis pada tahun 2016 adalah sebanyak 7 (Tujuh) sasaran. Bila dilihat pada Tingkat Pencapaian Sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, maka secara umum target yang telah dicapai dalam tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan komitmen dari Lurah dan seluruh staf serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan bidang Pemerintahan, Trantib & LH, Pembangunan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial.

Untuk memperoleh kejelasan dari sasaran strategis Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut ;

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (ada 4 unsur yang dinilai)	> 80 (Nilai IKM)	85	100
		2.	Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan	450	253	56,2
		3.	Jumlah Surat Pengantar Bidang Pelayanan	2500	2569	100

Sasaran strategis dalam melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan visi dan misi kantor Kelurahan Sungainangka yaitu pelayanan prima dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi sesuai dengan prosedur yang berlaku, pelayanan prima memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam layanan publik di wilayah Kelurahan Sungainangka. Meskipun Realisasi terhadap Pelayanan Surat Pengantar dan Surat Keterangan lebih kecil dari target, tidak berarti tingkat pencapaian dikatakan tidak berhasil karena ini dipengaruhi faktor eksternal yaitu jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan Surat Pengantar dan Surat Keterangan lebih sedikit dari tahun sebelumnya, sementara penentuan target tahun yang diukur dengan mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya.

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik	30 RT	30 RT	100
		2.	Persentase kehadiran RT pada Rapat Koordinasi RT	90 %	90 %	100
		3.	Persentase RT yang mengelola administrasi yang baik	85 %	90 %	100
		4.	Jumlah peserta STQ	35 Orang	35 Orang	100

Dalam menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan dan kemitraan kelurahan dapat didukung dari jumlah aparat kelurahan yang dapat memahami IT dengan baik dan dikelurahan Sungainangka terdapat 19 aparat baik PNS dan Non PNS yang dapat memahami IT dengan baik dan selain itu itu dengan sistem administrasi yang baik dan prosentase kehadiran RT dan PKK yang merupakan mitra untuk mendukung program dan kegiatan kelurahan dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	> 500 Juta	> 300 Juta	60
		2.	Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	15 Usulan	15 Usulan	100
		3.	Jumlah realisasi fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Sungainangka merupakan sasaran yang strategis yang ingin dicapai dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dengan mendapatkan hasil usulan dari RT dan Tokoh masyarakat maka hasil tersebut dibawa ke tingkat kecamatan selain itu Kelurahan memiliki kegiatan peningkatan swadaya masyarakat.

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6
4.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1.	Jumlah Poskamling yang aktif	20 Poskamling	20 Poskamling	100
		2.	Persentase angka kriminalitas	0%	0%	100
		3.	Angka validasi monitoring Kamtibmas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100

Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Kelurahan Sungainangka ada beberapa kegiatan untuk memaksimalkan sasaran strategis tersebut antara lain mendata dan memonitoring jumlah poskamling yang aktif, mengetahui persentase angka kriminalitas bekerjasama dengan pihak Babinsa dan Babinkamtibmas.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	1. Persentase bayi / balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian ibu	0% 0,02% 1900 orang 30 Posyandu 0%	0% 0,02% 1978 orang 24 Posyandu 0%	100 100 100 80 100

masyarakat.

Sasaran strategis dalam menyelenggarakan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan adalah dengan melihat angka validasi data penduduk serta Jumlah Keluarga Miskin, dengan melihat data tersebut dapat digambarkan jumlah umur dan warga yang produktif yang biasanya akan diberi pelatihan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas terkait dan dengan banyaknya UMKM yang ada secara langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
6.	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka validasi data penduduk a. Penyandang cacat b. Lansia c. Putus sekolah d. Buta huruf 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah keluarga miskin	14 Orang 491 Orang 80 Orang 30 Orang 300 UMKM 300 KK	14 Orang 503 Orang 73 Orang 32 Orang 325 UMKM 300 KK	100 100 100 100 100 100

kegiatan kerja bhakti massal.

Meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman kelurahan Sungainangka merupakan sasaran strategis Kelurahan Sungainangka, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Kelurahan dengan cara mensosialisasikan penerapan konsep CGH dan PHBS, lalu melaksanakan pengolahan sampah di rumah kompos namun Kelurahan Sungainangka belum memiliki Bank sampah dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan kerja bhakti massal.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Persentase pengolahan sampah pada Bank sampah dan Rumah Kompos 4. Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bakti Massal (KBM)	25 RT 2400 KK 25% 12 Kali	25 RT 2415 KK 20% 12 Kali	100 100 80 100

Meningkatkan kesehatan bayi / balita dan ibu adalah sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kelurahan Sungainangka dengan meningkatkan kerjasama dengan PLKB dalam kegiatan pendataan prosentase gizi buruk, bayi meninggal dan partisipasi bayi dan ibu serta angka kematian ibu setya menggalakan program KB ke masing – masing posyandu.

B. REALISASI ANGGARAAN

Untuk membiayai kegiatan dari berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Sungainangka pada Tahun Anggaran 2016 disediakan alokasi dana sebesar Rp. 2.669.211.400,- yang terdiri dari :

- Belanja Langsung sebesar Rp.1.559.422.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.493.698.543,-
- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.069.789.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.055.309.207,-

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kelurahan Sungainangka untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.559.422.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.493.698.543,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (+/-)	Pencapaian Target (%)
2.2.1	Belanja Pegawai	644.310.000	623.110.000	21.200.000	96,71
2.2.1.01	Honorarium PNS	136.880.000	127.370.000	9.510.000	93,05
2.2.1.02	Honorarium Non PNS	507.430.000	495.740.000	11.690.000	97,70
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	886.112.400	806.338.543	79.773.857	91,00
2.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.627.400	64.048.500	5.578.900	91,99
2.2.2.02	Belanja Bahan / Material	16.850.000	13.775.000	3.075.000	81,75
2.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.950.000	36.394.068	22.555.932	61,74
2.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.260.000	14.220.000	2.040.000	87,45
2.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	168.000.000	168.000.000	-	100

2.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000	5.000.000	-	100
2.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	157.655.000	133.455.000	24.200.000	84,65
2.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15.950.000	14.355.000	1.595.000	90,00
2.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000	87.772.800	7.227.200	92,39
2.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.520.000	10.085.000	435.000	95,87
2.2.2.21	Belanja Barang/ Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	214.600.000	212.533.175	2.066.825	99,04
2.2.2.37	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.200.000	28.450.000	4.750.000	85,69
2.2.2.44	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	24.500.000	18.250.000	6.250.000	74,49
2.2.3	Belanja Modal	69.000.000	64.250.000	4.750.000	93,12
2.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000	10.000.000	0	100
2.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000	12.800.000	3.200.000	80,00
2.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000	38.700.000	1.300.000	96,75

2. Belanja Tidak Langsung (BTL) Sebesar Rp. 1.069.789.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 1.055.309.207,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (+/-)	% Pencapaian Target
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.069.789.000	1.055.309.207	14.479.793	98.65
2.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	593.528.000	579.048.947	14.479.053	97,65
2.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	476.261.000	476.260.260	740	100

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada Kelurahan Sungainangka Tahun Anggaran 2016, mengacu dan berpedoman undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/sg Tanggal 21 September 2006 perihal pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan Landasan hukum yang dipakai dalam mekanisme penyusunan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan (pelaksanaan) Anggaran maupun pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Kinerja atau Prestasi Kerja.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Sungainangka Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2016. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2002 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka AKIP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi Instansi Pemerintah terhadap masyarakat.

B. SARAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungainangka sebaiknya disusun oleh setiap Instansi Pemerintah pada akhir tahun sehingga dapat dilihat hasil kinerja program dan kegiatan secara akuntabilitas dapat terukur dan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai didalam penetapan kinerja.

Balikpapan, Januari 2017

LURAH SUNGAINANGKA



MOHAMAD ILHAM

Penata Tk.1

NIP.196304051986011008

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. SK. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
4. LAIN – LAIN YANG DIANGGAP PERLU



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
KELURAHAN SUNGAINANGKA

Jl. MT. Haryono GG. Aren RT. 027 Telp. (0542)873862 Balikpapan 76114

KEPUTUSAN LURAH SUNGAINANGKA
NOMOR : 970 / 4.1 / Sekrt / I / 2013

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN SUNGAINANGKA TAHUN 2013-2016

LURAH SUNGAINANGKA

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Sungainangka tahun 2013-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Sungainangka tahun 2013-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya ;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kelurahan Sungainangka tahun 2013-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Sungainangka tahun 2013-2016 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Sungainangka tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sungainangka tahun 2013-2016
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) ;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN SUNGAINANGKA TAHUN 2013 – 2015
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sungainangka Tahun 2013-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kelurahan Sungainangka yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2013-2016 yang merupakan penjabaran dari terget kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sungainangka Tahun 2013-2016
- KEDUA : Indikatot Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sungainangka Tahun 2013 – 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis (1)		Indikator Kinerja (2)		Alasan / Sumber Data (3)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	1.	Prosentase Keluhan yang ditindak lanjuti	1.	Laporan RT & Masyarakat
		2.	Rata- rata kecepatan waktu penyelesaian surat pengantar / surat keterangan	2.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		3.	Jumlah surat keterangan bidang pelayanan	3.	Keputusan Pelimpahan Kewenangan
		4.	Jumlah surat pengantar bidang pelayanan		
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik	1.	Laporan Hasil Pendataan
		2.	Presentase kehadiran RT pada rapat koordinasi RT	2.	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3.	Presentase RT yang mengelola administrasi yang baik	3.	Jumlah angka partisipan
		4.	Jumlah peserta STQ		
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	1.	Laporan Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan
		2.	Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan	2.	Hasil monitoring dan pemantauan
		3.	Jumlah Realisasi Fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	3.	Rekapitulasi Data
		4.	Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan PNPM Mandiri		
4.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	1.	Laporan Hasil Kegiatan
		2.	Prosentase Angka kriminalitas	2.	Hasil monitoring dan pemantauan
		3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	3.	Rekapitulasi Data
5.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan & Kesehatan Lingkungan Pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	1.	Laporan Hasil Kegiatan
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	2.	Hasil monitoring dan pemantauan
		3.	Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos	3.	Rekapitulasi Data
		4.	Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)		
6.	Meningkatnya perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1.	Angka Validasi Data Penduduk (Cacat, Lansia... dst)	1.	Hasil monitoring dan pendataan
		2.	Jumlah UMKM	2.	Rekapitulasi Data
		3.	Jumlah Keluarga Miskin		
7.	Meningkatnya Kesehatan Bayi / Balita dan Ibu	1.	Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk	1.	Hasil monitoring dan pendataan
		2.	Prosentase bayi/balita yang meninggal	2.	Laporan Hasil Kegiatan
		3.	Jumlah peserta KB	3.	Rekapitulasi Data
		4.	Jumlah posyandu aktif		
		5.	Angka kematian ibu		

KETIGA : Seksi di lingkungan Kelurahan Sungainangka dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sungainangka Tahun 2013-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 11 Januari 2013

LURAH SUNGAINANGKA



MOHAMAD ILHAM

Penata Tk.I

NIP. 19630405 198601 1 008

Tembusan :

1. Walikota Balikpapan.
2. Inspektur Kota Balikpapan.
3. Kepala BPKAD Kota Balikpapan.
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan.
5. Camat Balikpapan Selatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD ILHAM**

Jabatan : **LURAH SUNGAINANGKA**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Balikpapan, 15 Januari 2016
Pihak Pertama


MOHAMMAD ILHAM

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Sungainangka
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat (Pelayanan Prima)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (ada 14 unsur yang dinilai) 2. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan 3. Jumlah Surat Pengantar Bidang Pelayanan	> 80 (nilai IKM) 450 2500
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik 2. Persentase kehadiran RT pada Rapat Koordinasi RT 3. Persentase RT yang mengelola administrasi yang baik 4. Jumlah peserta STQ	30 RT 90% 85% 35 Orang
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Tingkat 3. Jumlah realisasi fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	> 500 Juta 15 Usulan 15 Kegiatan
4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1. Jumlah Poskamling yang aktif 2. Persentase angka kriminalitas 3. Angka validasi monitoring Kamtibmas	20 Poskamling 0,03% 12 Kegiatan
5	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Persentase pengolahan sampah pada Bank Sampah dan Rumah 4. Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bakti Massal (KBM)	25 RT 2400 KK 25% 12 Kali
6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka validasi data penduduk a. Penyandang cacat b. Lansia c. Putus sekolah d. Buta huruf 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah keluarga miskin	14 Orang 491 Orang 80 Orang 30 Orang 300 300 KK
7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	1. Persentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian ibu	0% 0 Kali 1900 Orang 30 Posyandu 0 Kali

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	391.806.400
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	383.900.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	7.450.000
4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	76.250.000
5 Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rp	70.000.000
6 Program Pengembangan Data/Informasi	Rp	8.017.000
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	28.770.000
8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	50.000.000
9 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp	711.171.100
10 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	288.386.000



Balikpapan, 15 Januari 2016

Lurah Sungainangka

Mohamad Uham

Mohamad Uham

Penata Tk. I

NIP. 196304051986011008

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Sungainangka
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat (Pelayanan Prima)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (ada 14 unsur yang dinilai) 2. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan 3. Jumlah Surat Pengantar Bidang Pelayanan	> 80 (nilai IKM) 450 2500	85 253 2569	100 56,2 100
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik 2. Persentase kehadiran RT pada Rapat Koordinasi RT 3. Persentase RT yang mengelola administrasi yang baik 4. Jumlah peserta STQ	30 RT 90% 85% 35 Orang	30 RT 90% 90% 35 Orang	100 100 100 100
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Tingkat 3. Jumlah realisasi fisik kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	> 500 Juta 15 Usulan 15 Kegiatan	> 300 Juta 15 Usulan 15 Kegiatan	60 100 100
4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1. Jumlah Poskamling yang aktif 2. Persentase angka kriminalitas 3. Angka validasi monitoring Kamtibmas	20 Poskamling 0,00% 12 Kegiatan	20 Poskamling 0,00% 12 Kegiatan	100 100 100
5	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Persentase pengolahan sampah pada Bank Sampah dan Rumah 4. Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bakti Massal (KBM)	25 RT 2400 KK 25% 12 Kali	25 RT 2415 20% 12 Kali	100 100 80 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016


Rp
 Rp

2.669.211.400
 2.549.007.750

6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka validasi data penduduk	14 Orang	14 Orang	100
		a. Penyandang cacat	14 Orang	14 Orang	100
6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	b. Lansia	491 Orang	503 Orang	100
		c. Putus sekolah	80 Orang	73 Orang	100
6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	d. Buta huruf	30 Orang	32 Orang	100
		2. Jumlah UMKM	300	325	104
6	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	3. Jumlah keluarga miskin	300 KK	300 KK	100
		1. Persentase bayi/balita dengan gizi buruk	0%	0%	100
7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	2. Angka kematian bayi	0 Kali	0 Kali	100
		3. Jumlah peserta KB	1900 Orang	1978 Orang	100
7	Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu	4. Jumlah Posyandu aktif	30 Posyandu	24 Posyandu	80
		5. Angka kematian ibu	0 Kali	0%	100

Balikpapan, Januari 2017

Lurah Sungaimangka


 Mohamad Iham
 Penata Tk. I

NIP. 196304051986011008

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
SKPD : 1.20.41. - KELURAHAN SUNGAINANGKA
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Prognosis	%
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA	2.669.211.400,00	2.549.007.750,00	120.203.650,00	120.203.650,00	95,50
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.069.789.000,00	1.055.309.207,00	14.479.793,00	14.479.793,00	98,65
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.069.789.000,00	1.055.309.207,00	14.479.793,00	14.479.793,00	98,65
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	593.528.000,00	579.048.947,00	14.479.053,00	14.479.053,00	97,56
2.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	471.497.000,00	459.996.980,00	11.500.020,00	11.500.020,00	97,56
2.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	39.682.000,00	38.713.904,00	968.096,00	968.096,00	97,56
2.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	39.842.000,00	38.870.000,00	972.000,00	972.000,00	97,56
2.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	12.126.000,00	11.830.000,00	296.000,00	296.000,00	97,56
2.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	26.575.000,00	25.926.360,00	648.640,00	648.640,00	97,56
2.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.798.000,00	3.704.556,00	93.444,00	93.444,00	97,54
2.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	8.000,00	7.147,00	853,00	853,00	89,34
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	476.261.000,00	476.260.260,00	740,00	740,00	100,00
2.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	59.850.000,00	59.850.000,00	-	-	100,00
2.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja	416.411.000,00	416.410.260,00	740,00	740,00	100,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.599.422.400,00	1.493.698.543,00	105.723.857,00	105.723.857,00	93,39
2.2.1.	Belanja Pegawai	644.310.000,00	623.110.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	96,71
2.2.1.01.	Honorarium PNS	136.880.000,00	127.370.000,00	9.510.000,00	9.510.000,00	93,05
2.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.730.000,00	60.370.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	89,13
2.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.200.000,00	9.400.000,00	800.000,00	800.000,00	92,16
2.2.1.01.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	58.950.000,00	57.600.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	97,71
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	507.430.000,00	495.740.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00	97,70
2.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	134.000.000,00	133.110.000,00	890.000,00	890.000,00	99,34
2.2.1.02.002.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	364.770.000,00	354.120.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	97,08
2.2.1.02.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.660.000,00	8.510.000,00	150.000,00	150.000,00	98,27
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	886.112.400,00	806.338.543,00	79.773.857,00	79.773.857,00	91,00
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.627.400,00	64.048.500,00	5.578.900,00	5.578.900,00	91,99
2.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	42.512.400,00	38.579.500,00	3.932.900,00	3.932.900,00	90,75
2.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.695.000,00	7.421.500,00	273.500,00	273.500,00	96,45
2.2.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	100,00
2.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.050.000,00	9.997.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00	90,48
2.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.850.000,00	2.555.000,00	295.000,00	295.000,00	89,65
2.2.2.01.010.	Belanja Alat/Perlengkapan Peserta	1.620.000,00	1.595.000,00	25.000,00	25.000,00	98,46
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.850.000,00	13.775.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	81,75
2.2.2.02.007.	Belanja Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah	2.900.000,00	2.090.000,00	810.000,00	810.000,00	72,07
2.2.2.02.008.	Belanja Dekorasi	11.450.000,00	9.185.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	80,22
2.2.2.02.009.	Belanja Souvenir	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	100,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.950.000,00	36.394.068,00	22.555.932,00	22.555.932,00	61,74

Permendagri 13/2006

SIPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Prognosis	%
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00	3.425.949,00	2.574.051,00	2.574.051,00	57,10
2.2.2.03.002.	Belanja air	6.000.000,00	2.400.900,00	3.599.100,00	3.599.100,00	40,02
2.2.2.03.003.	Belanja listrik	30.000.000,00	16.297.219,00	13.702.781,00	13.702.781,00	54,32
2.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.050.000,00	2.170.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	53,58
2.2.2.03.014.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.900.000,00	12.100.000,00	800.000,00	800.000,00	93,80
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.260.000,00	14.220.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	87,45
2.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.500.000,00	5.210.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	80,15
2.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.660.000,00	7.910.000,00	750.000,00	750.000,00	91,34
2.2.2.06.003.	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	100,00
2.2.2.07.	Belanja Sewa	168.000.000,00	168.000.000,00	-	-	100,00
2.2.2.07.002.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	168.000.000,00	168.000.000,00	-	-	100,00
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	100,00
2.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	100,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.655.000,00	133.455.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	84,65
2.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26.025.000,00	21.610.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	83,04
2.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.550.000,00	28.050.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	91,82
2.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan	97.080.000,00	83.795.000,00	13.285.000,00	13.285.000,00	86,32
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.950.000,00	14.355.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	90,00
2.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	7.150.000,00	5.775.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	80,77
2.2.2.14.005.	Belanja Pakaian Seragam Tertentu	8.800.000,00	8.580.000,00	220.000,00	220.000,00	97,50
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	87.772.800,00	7.227.200,00	7.227.200,00	92,39
2.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.000.000,00	87.772.800,00	7.227.200,00	7.227.200,00	92,39
2.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.520.000,00	10.085.000,00	435.000,00	435.000,00	95,87
2.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.520.000,00	10.085.000,00	435.000,00	435.000,00	95,87
2.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	214.600.000,00	212.533.175,00	2.066.825,00	2.066.825,00	99,04
2.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	214.600.000,00	212.533.175,00	2.066.825,00	2.066.825,00	99,04
2.2.2.37.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga/Masyarakat	33.200.000,00	28.450.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	85,69
2.2.2.37.001.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.700.000,00	9.450.000,00	(4.750.000,00)	(4.750.000,00)	201,06
2.2.2.37.002.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	28.500.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	66,67
2.2.2.44.	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	24.500.000,00	18.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	74,49
2.2.2.44.001.	Belanja Jasa Tenaga Ahil	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	100,00
2.2.2.44.002.	Belanja Jasa Narasumber	4.750.000,00	3.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	78,95
2.2.2.44.003.	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	7.000.000,00	6.750.000,00	250.000,00	250.000,00	96,43
2.2.2.44.005.	Belanja Jasa Tenaga Lepas	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	69.000.000,00	64.250.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	93,12
2.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	250.000,00	91,67
2.2.3.23.005.	Bengkel Tak Bermesin Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	250.000,00	91,67

Permendagri 13/2006

SIPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Prognosis	%
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	100,00
2.2.3.27.007.	Belanja modal Pengadaan Proyektor/Infocus	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	100,00
2.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	12.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	80,00
2.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	16.000.000,00	12.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	80,00
2.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	38.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	96,75
2.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	100,00
2.2.3.29.007.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.000.000,00	10.700.000,00	300.000,00	300.000,00	97,27
2.2.3.29.009.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00	200.000,00	96,00
2.2.3.29.012.	Belanja Modal Pengadaan Komputer NoteBook	10.000.000,00	9.200.000,00	800.000,00	800.000,00	92,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.669.211.400,00)	(2.549.007.750,00)	(120.203.650,00)	(120.203.650,00)	95,50